



**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

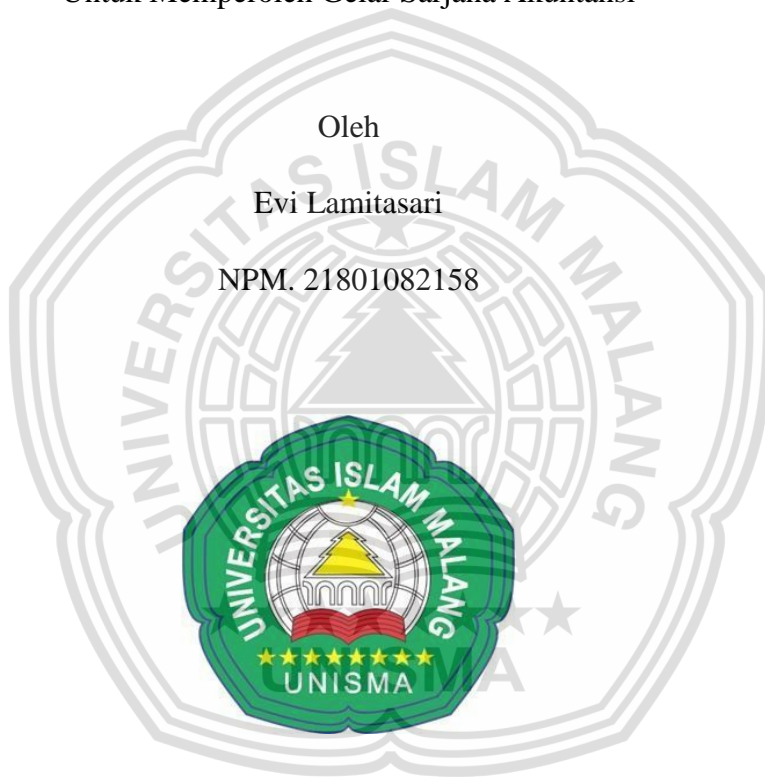
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Evi Lamitasari

NPM. 21801082158



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

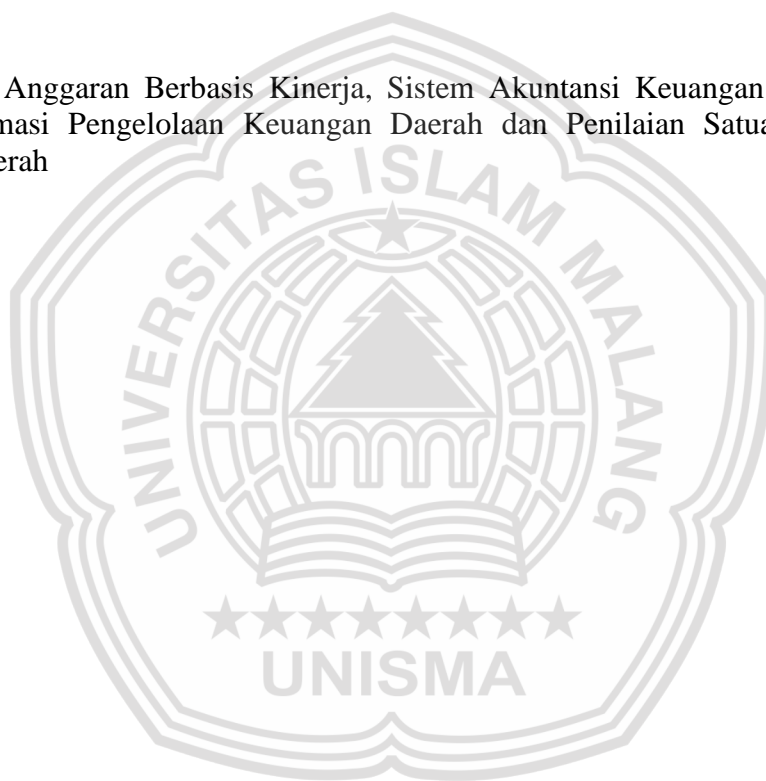
2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

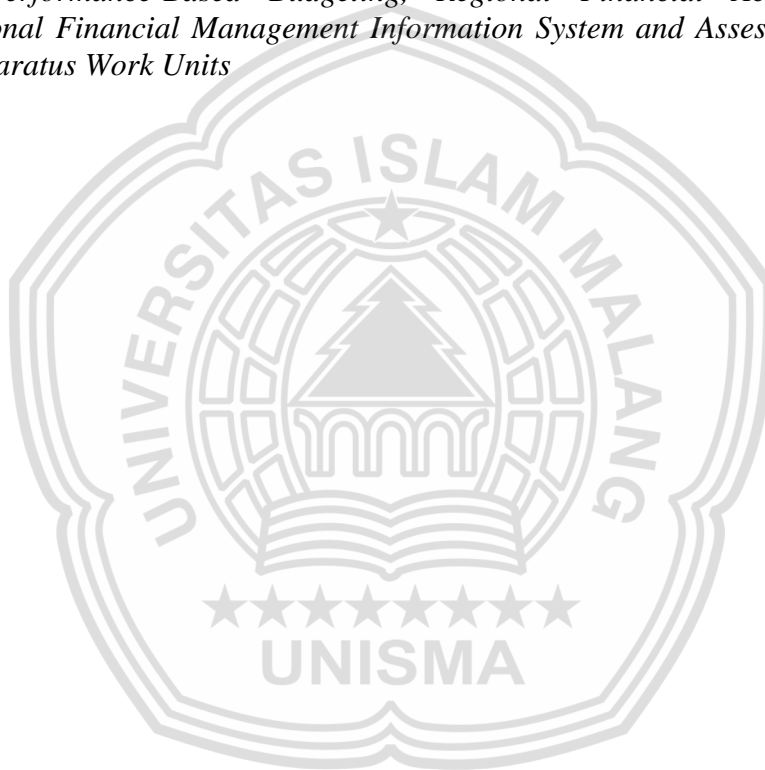


ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of performance-based budgeting, regional financial accounting systems, and regional financial management information systems on the assessment of regional work units. This research is a kind of quantitative approach. The analytical method used is quantitative data analysis using SPSS. The sampling technique used in this study was purposive sampling.

The results of this study indicate that partially there is a significant effect of performance-based budgeting, regional financial accounting systems, and regional financial management information systems on the assessment of regional work units.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Regional Financial Accounting System, Regional Financial Management Information System and Assessment of Regional Apparatus Work Units*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat menuntut pemerintahan memberikan kinerja dengan baik dan optimal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kinerja menjadi gambaran mengenai pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan visi dan misi suatu organisasi. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintahan daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja akan tercermin pada laporan pertanggung jawaban pada bentuk laporan prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (Sem, 2012).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal pemerintah daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah pada pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, serta potensi daerah tersebut. Adanya pemberian otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Bastian, 2006 : 12)

Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) ialah amanat rakyat pada pemda buat mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

pada satu tahun finansial tertentu yang dinyatakan dalam mata uang. Perwujudan amanat masyarakat pada sisi pemerintahan daerah ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintahan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan demikian penyusunan anggaran pemerintah daerah wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat public (Indra Bastian,2006)

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah perihal pengelolaan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005). Pada struktur pemda, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menyusun laporan keungan yang akan disampaikan kepada kepala daerah menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Menteri keuangan memutuskan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP No. 13) perihal Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.

Seiring dengan penetapan pemerintahan No. 24 tahun 2005 perihal Standar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) adalah sistem yang terdiri dari bermacam-macam program penyusunan/penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi serta Penyusunan Laporan Keuangan.Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintahan No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pmendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Pmendagri No. 59 Tahun 2007 No. perihal Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ini mengambil judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk referensi dalam menganalisis mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah secara umum.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F.
- b. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t.
- c. Terdapat pengaruh parsial antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t.
- d. Terdapat pengaruh parsial antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t.

5.2 Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi kepada peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitian ini agar menjadi lebih baik. Keterbatasan penelitian ini antara lain :

- a. Peneliti dalam mendapatkan data responden tidak dapat bertemu secara langsung karena penelitian tidak diperbolehkan mengganggu jam kerja pegawai.
- b. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dari instrument kuisisioner yang didasarkan dari jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrument kuisisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut ini beberapa saran untuk penelitian yang akan datang antara lain :

- a. Bagi peneliti berikutnya hendaknya menambah variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh pada Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Septyanto, H., & Mujiyati, M. (2015). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kertiani, N. M., Kusumawati, N. P. A., & Ayu, P. C. (2020). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 204-222.
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1-7.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Annisa, V., Darlis, E., & Al Azhar, A. (2017). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyono, 2009, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Wijayati, R. A. R. (2019). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).
- Putra, T. S. (2010). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun.